

KATA PENGANTAR

Sejarah perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia mengalami suatu perubahan dan perkembangan yang sangat besar terutama berkaitan dengan gerakan reformasi. Namun demikian setelah kurang lebih sembilan tahun bangsa Indonesia melakukan reformasi di segala bidang, fakta menunjukkan terjadinya carut-marut dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Reformasi di bidang hukum dan politik telah banyak dilakukan, namun kenyataannya tidak membawa perubahan yang berarti dalam kehidupan rakyat, terutama menyangkut kesejahteraan, baik lahir maupun batin. Dalam perkembangan kehidupan kenegaraan, nampak arah prinsip konstitusionalisme dan demokrasi sangat dominan, namun mengabaikan prinsip *welfare state*.

Meskipun proses demokratisasi melalui aspek normatif kenegaraan telah banyak dilakukan setelah reformasi, namun secara esensial pengertian kekuasaan di tangan rakyat menjadi bias. Kekuasaan rakyat nampak dominan tatkala melakukan Pemilu atau Pilkada, namun setelah itu saluran demokrasi tersumbat, permasalahan yang dihadapi oleh rakyat kurang terakomodir dalam kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu sistem demokrasi dewasa ini, justru memberikan kekuasaan yang sangat besar terhadap Presiden dan DPR, karena nampak dalam berbagai kebijakan bukan atas dasar kehendak rakyat, melainkan kehendak penguasa baik eksekutif maupun legislatif.

Meskipun pasca reformasi rakyat seakan-akan nampak menengenyam kebebasan, namun dalam kenyataannya kebebasan itu bersifat semu, karena dalam kenyataannya, kalangan elit politiklah yang menengenyam kebebasan. Fakta menunjukkan bahwa untuk berpartisipasi dalam kekuasaan politik baik eksekutif maupun legislatif, nampaknya berkorelasi positif dengan biaya yang sangat tinggi, sehingga kondisi seperti ini rakyat kecil sulit ikut berpartisipasi.

Selain itu pasca reformasi dewasa ini semua warga negara merasakan betapa sangat rapuhnya nasionalisme Indonesia. Banyak anak-anak bangsa Indonesia mengembangkan organisasi swadaya masyarakat, namun dalam kenyataannya loyalitasnya lebih kuat pada kekuatan

internasional, atau bahkan transnasional, sehingga dukungan internasional sangat dominan. Akibatnya persoalan-persoalan bangsa terutama yang menyangkut persatuan dan kesatuan tidak mendapat perhatian, akibatnya rasa nasionalismenyapun juga semakin pudar.

Kaburnya pengertian bernegara pada warga negara merupakan kenyataan pahit yang kita lihat pada era reformasi dewasa ini. Banyak elemen dan kelompok masyarakat mengembangkan potensinya, namun tidak jarang mengarah pada gerakan separatis yang menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan yang dahulu dikenal dengan Pendidikan Kewiraan, adalah materi perkuliahan yang menyangkut pemahaman tentang persatuan dan kesatuan, kesadaran warga negara dalam bernegara, yang meliputi filsafat Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara, identitas nasional, demokrasi Indonesia, negara dan konstitusi, *rule of law*, geopolitik dan geostrategi Indonesia, hak dan kewajiban warga negara dalam berbangsa dan bernegara, serta pendidikan bela negara yang tertuang dalam suatu Surat Keputusan Dirjen Dikti No.43/DIKTI/2006. Dalam pengembangan materi perkuliahan tersebut dengan sendirinya juga dikembangkan kemampuan kepribadian dan kemampuan intelektual dalam bidang politik, hukum, masyarakat, filsafat dan budaya. Materi tersebut juga membahas tentang demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan sosial budaya, ekonomi serta pertahanan dan keamanan. Materi dikembangkan dan disajikan secara objektif dan ilmiah dan tanpa unsur doktriner.

Oleh karena itu materi perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya tidak bersifat militeristik melainkan, objektif dan ilmiah. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi semua pihak, terima kasih.

Yogyakarta, Mei 2007

Penulis